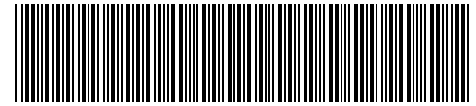




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.10.1.409288/2023**



DS:9814-9644-9400-0160

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- Sebesar : Rp. 47.741.425.000 (EMPAT PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	47.741.425.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 47.741.425.000

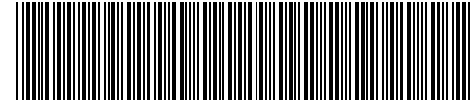
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2023

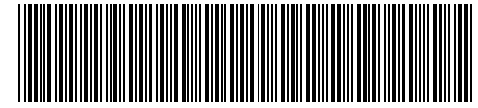


DS:9814-9644-9400-0160

Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	4.335.189.000
BB.1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp.	2.737.390.000
BB.1613	Perencanaan Hukum Nasional	Rp.	1.597.799.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	4.472.643.000
BF.1610	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp.	1.702.291.000
BF.1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp.	2.770.352.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	38.933.593.000
WA.1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp.	38.933.593.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



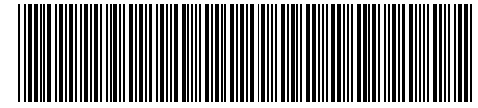
DS:9814-9644-9400-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			4.335.189.000
Kegiatan	:	1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional			2.737.390.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan			
		2. 02	Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional			
		3. 03	Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1611.AAD	Peraturan Presiden	1,00	PerPres, R.Perpres	550.000.000
Rincian Output	:	01 AAD.001	Rancangan Peraturan Presiden Mengenai Pemantauan dan Peninjauan/Analisis dan Evaluasi Hukum	1,00	R.Perpres	550.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1611.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	201,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.587.390.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	200,00	Rekomendasi Kebijakan	1.037.390.000
		02 ABD.002	Rekomendasi Pembangunan Hukum Nasional	1,00	Rekomendasi Kebijakan	550.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1611.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	100,00	Orang	600.000.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum (Pusat dan Daerah)	100,00	Orang	600.000.000
Kegiatan	:	1613	Perencanaan Hukum Nasional			1.597.799.000
	:	1. 01	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda			
		2. 02	Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang			
		3. 03	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya			
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1613.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	13,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.597.799.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Program Legislasi	3,00	Rekomendasi Kebijakan	689.474.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9814-9644-9400-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : I A. 2

Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				Rekomendasi Kebijakan, Kajian		
	02	ABD.002	Rekomendasi Naskah Akademik RUU	3.00	Rekomendasi Kebijakan	474.851.000
	03	ABD.003	Rekomendasi Penyelesaian Naskah Akademik	7.00	Rekomendasi Kebijakan	433.474.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			4.472.643.000
Kegiatan	:	1610	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional			1.702.291.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif			
		2. 02	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum			
		3. 03	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1610.BMA	Data dan Informasi Publik	166.00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.702.291.000
Rincian Output	:	01	BMA.001 Fasilitasi Integrasi JDIHN	163.00	layanan	1.429.371.000
		02	BMA.002 Fasilitasi Layanan Perpustakaan Hukum	3.00	layanan	272.920.000
Kegiatan	:	1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum			2.770.352.000
	:	1. 01	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		2. 02	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1612.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	432.00	Orang	813.324.000
Rincian Output	:	01	ADG.001 Pembinaan Penyuluh Hukum Nasional	432.00	Orang	813.324.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1612.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	410.00	Kelompok Masyarakat	906.860.000
Rincian Output	:	01	BDD.001 Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum	315.00	Kelompok Masyarakat	598.488.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



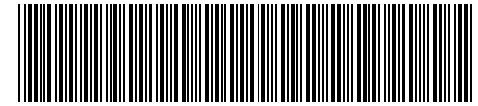
DS:9814-9644-9400-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : I A. 3

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				Kelompok Masyarakat				
	02	BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	95.00	Kelompok Masyarakat	308.372.000		
Klasifikasi Rincian Output	4	: 1612.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	652.00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	1.050.168.000		
Rincian Output		: 01	BIC.001	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	652.00	Lembaga	1.050.168.000	
Program		: 013.10.WA	Program Dukungan Manajemen			38.933.593.000		
Kegiatan		: 1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN			38.933.593.000		
Indikator Kinerja Kegiatan		: 1.	01	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional				
			2.	02 Jumlah Layanan Internal				
			3.	03 Jumlah Layanan Perkantoran				
Klasifikasi Rincian Output	1	: 1614.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	29.226.803.000		
Rincian Output		: 01	EBA.956	Layanan BMN	1.00	Layanan	248.151.000	
			02	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.00	Layanan	525.967.000
			03	EBA.959	Layanan Protokoler	1.00	Layanan	100.000.000
			04	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	182.218.000
			05	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	269.190.000
			06	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	146.861.000
			07	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	27.754.416.000
Klasifikasi Rincian Output	2	: 1614.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	69,00	Unit, m2, Paket	7.652.728.000		
Rincian Output		: 01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	68.00	Unit	1.840.728.000	
			02	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.00	Unit	5.812.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9814-9644-9400-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : I A. 4

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Unit, m2, Paket

Klasifikasi Rincian Output	3	:	1614.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	239,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	382.070.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	239.00	Orang	382.070.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1614.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.671.992.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	290.000.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	249.691.000
		:	03 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	357.725.000
		:	04 EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1,00	Dokumen	328.543.000
		:	05 EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,00	Dokumen	446.033.000

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2023

I B. SUMBER DANA



DS:9814-9644-9400-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

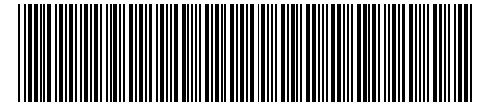
Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	47.741.425.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	47.741.425.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



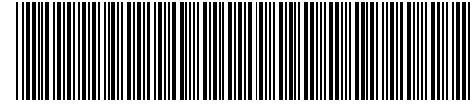
DS:9814-9644-9400-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	17.552.977	22.495.720	7.692.728	-	-	47.741.425		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	4.335.189	-	-	-	4.335.189		
1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	-	2.737.390	-	-	-	2.737.390		
1611.AAD	Peraturan Presiden (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	550.000	-	-	-	550.000	01 . 99	
01	RM	-	550.000	-	-	-	550.000	139	
1611.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	1.587.390	-	-	-	1.587.390	01 . 99	
01	RM	-	1.587.390	-	-	-	1.587.390	139	
1611.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	600.000	-	-	-	600.000	01 . 99	
01	RM	-	600.000	-	-	-	600.000	139	
1613	Perencanaan Hukum Nasional	-	1.597.799	-	-	-	1.597.799		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9814-9644-9400-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1613.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	1.597.799	-	-	-	1.597.799	01 . 99	
01	RM	-	1.597.799	-	-	-	1.597.799	139	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	4.432.643	40.000	-	-	4.472.643		
1610	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	-	1.662.291	40.000	-	-	1.702.291		
1610.BMA	Data dan Informasi Publik (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	1.662.291	40.000	-	-	1.702.291	01 . 99	
01	RM	-	1.662.291	40.000	-	-	1.702.291	139	
1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	-	2.770.352	-	-	-	2.770.352		
1612.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	813.324	-	-	-	813.324	01 . 99	
01	RM	-	813.324	-	-	-	813.324	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



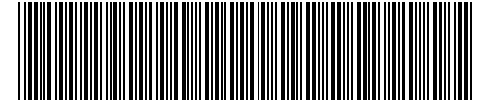
DS:9814-9644-9400-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1612.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	906.860	-	-	-	906.860	01 . 99	
01	RM	-	906.860	-	-	-	906.860	139	
1612.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	1.050.168	-	-	-	1.050.168	01 . 99	
01	RM	-	1.050.168	-	-	-	1.050.168	139	
013.10.WA	Program Dukungan Manajemen	17.552.977	13.727.888	7.652.728	-	-	38.933.593		
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	17.552.977	13.727.888	7.652.728	-	-	38.933.593		
1614.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	17.552.977	11.673.826	-	-	-	29.226.803	01 . 99	
01	RM	17.552.977	11.673.826	-	-	-	29.226.803	139	
1614.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	-	7.652.728	-	-	7.652.728	01 . 99	
01	RM	-	-	7.652.728	-	-	7.652.728	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9814-9644-9400-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Kewenangan : (KP)

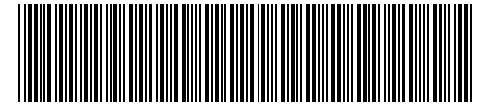
Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1614.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	382.070	-	-	-	382.070	01 . 99	
01 RM		-	382.070	-	-	-	382.070	139	
1614.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	1.671.992	-	-	-	1.671.992	01 . 99	
01 RM		-	1.671.992	-	-	-	1.671.992	139	
JUMLAH		17.552.977	22.495.720	7.692.728	-	-	47.741.425		

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9814-9644-9400-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.889.018	3.814.281	4.403.093	4.625.890	4.201.762	5.140.462	4.173.502	3.722.963	4.375.777	3.704.797	3.471.220	3.218.659	47.741.425
		BELANJA PEGAWAI	1.297.096	1.515.476	1.489.816	2.220.589	1.112.755	2.205.389	1.230.635	1.223.357	1.227.214	1.324.684	1.260.898	1.445.068	17.552.977
		BELANJA BARANG	954.200	1.661.083	2.275.555	1.767.579	2.451.285	2.277.351	2.305.145	1.861.884	2.490.841	1.742.391	1.572.600	1.135.805	22.495.720
		BELANJA MODAL	637.722	637.722	637.722	637.722	637.722	657.722	637.722	637.722	657.722	637.722	637.722	637.786	7.692.728
013.10.BB.1611		Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	63.566	79.104	265.697	85.144	594.165	209.795	343.399	128.882	513.276	155.941	180.475	117.947	2.737.390
013.10.BB.1613		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Perencanaan Hukum Nasional	63.566	79.104	265.697	85.144	594.165	209.795	343.399	128.882	513.276	155.941	180.475	117.947	2.737.390
013.10.BF.1610		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	0	15.417	222.774	39.980	183.521	121.024	272.349	123.964	400.373	68.026	219.677	35.188	1.702.291
013.10.BF.1612		52 BELANJA BARANG DAN BARANG 53 BELANJA MODAL Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	0	15.417	222.774	39.980	183.521	101.024	272.349	123.964	380.373	68.026	219.677	35.188	1.662.291
013.10.WA.1614		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	31.620	54.531	525.218	171.293	343.369	402.635	307.340	317.416	234.823	285.364	93.202	3.540	2.770.352
			31.620	54.531	525.218	171.293	343.369	402.635	307.340	317.416	234.823	285.364	93.202	3.540	2.770.352
			2.789.162	3.447.588	3.196.509	4.205.157	2.864.529	4.169.238	3.088.448	3.029.808	3.095.993	3.028.493	2.963.470	3.055.199	38.933.593

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9814-9644-9400-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

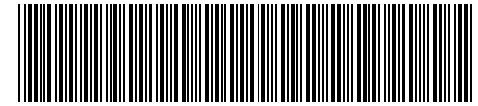
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		BPHN													
		51 BELANJA PEGAWAI	1.297.096	1.515.476	1.489.816	2.220.589	1.112.755	2.205.389	1.230.635	1.223.357	1.227.214	1.324.684	1.260.898	1.445.068	17.552.977
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	854.344	1.294.390	1.068.971	1.346.846	1.114.052	1.326.127	1.220.091	1.168.729	1.231.057	1.066.087	1.064.850	972.345	13.727.888
		53 BELANJA MODAL	637.722	637.722	637.722	637.722	637.722	637.722	637.722	637.722	637.722	637.722	637.722	637.786	7.652.728
		PERKIRAAN PENERIMAAN	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
		- PNBP (425131)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2023
IV A. B L O K I R**



DS:9814-9644-9400-0160

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409288] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

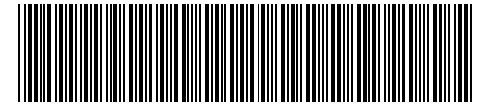
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:9814-9644-9400-0160

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409288] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL		
013.10.WA	Program Dukungan Manajemen		
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN		
1614.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
		Rp.	5.812.000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	* Renovasi Gedung dan Bangunan seluas 1800m2	Rp.	5.812.000

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001